



# Potensi Negara G20 Sebagai Solusi Penumpas Persampahan Kabupaten Sidoarjo Untuk Mendukung Laju Ekonomi

## *The Potential of G20 Countries as a Solution to Eradicating Waste in Sidoarjo Regency to Support the Economy*

**Muhammad Asrul Maulana<sup>1</sup>**

Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, Sidoarjo, Indonesia

Artikel Masuk : 17 November 2022

Artikel Diterima : 18 November 2022

Tersedia Online : 31 Agustus 2023

**Abstrak:** Berdasarkan data Badan Statistik Kabupaten Sidoarjo penduduk mencapai 2.082.801 jiwa, dan bertambah setiap tahunnya, hal itu menandakan, bahwa perekonomian berkembang pesat, dan pusat perekonomian di dominasi oleh pedagang, dari situ timbulah peningkatan jumlah volume sampah di Sidoarjo, sehingga terjadilah fenomena sosial tumpukan sampah di wilayah Sidoarjo. Akibatnya adalah laju ekonomi terhambat, pengedaran persampahan tidak optimal, Untuk itu penulis sepakat ingin mengkaji lebih dalam mengenai kesiapan dan solusi penumpas persampahan di Kabupaten Sidoarjo untuk menghadapi laju pertumbuhan ekonomi yang terus meningkat, sehingga perlu adanya kesiapan pengaruh negara G20 terhadap pertumbuhan penduduk masyarakat Sidoarjo, efek bola salju negara G20 terhadap persampahan di Sidoarjo, mengetahui hambatan dan penyelesaian masalah peningkatan sampah sebagai akibat adanya negara G20 dan menciptakan lingkungan layak huni di Sidoarjo, untuk kesehatan masyarakat. Dan menggunakan metode Deskriptif sebagai langkah metodologisnya dengan diperkuat oleh metode normatif, serta menggunakan data kualitatif yang terjadi secara nyata.

**Kata Kunci:** ekonomi; negara G20; persampahan

**Abstract:** Based on data from the Sidoarjo Regency Statistics Agency, the population reaches 2,082,801 people, and is increasing every year. This indicates that the economy is growing rapidly, and the center of the economy is dominated by traders. waste in the Sidoarjo area. The result is that the economic speed is hampered, the circulation of waste is not optimal. For this reason, the authors agree to examine more deeply the readiness and solutions for waste suppression in Sidoarjo Regency to deal with the rate of economic growth which continues to increase, so that there is a need for readiness for the influence of the G20 countries on population growth for the people of Sidoarjo, the snowball effect of the G20 countries on solid waste in Sidoarjo, knowing the obstacles and solving the problem of increasing waste as a result of the G20 countries and creating a livable environment in Sidoarjo, for public health. And using the descriptive method as a methodological step reinforced by normative methods, and using qualitative data that actually happened.

**Keywords:** economy; G20 countries; garbage.

<sup>1</sup> Korespondensi Penulis: Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, Sidoarjo, Indonesia  
Email: asrulnaa7@gmail.com

## Pendahuluan

Akhir-akhir ini terdapat kabar bahwa Indonesia termasuk kedalam anggota G20, yaitu merupakan negara maju dan negara berkembang yang pendapatannya standarisasi menengah hingga tinggi, karena di tahun 1999 Indonesia menjadi wakil negara berkembang di Asia Tenggara. Anggota G20 sendiri terdiri dari Uni Eropa, Turki, China, Perancis, Rusia, Republik Korea, Meksiko, Kanada, Jerman, Jepang, Italia, Inggris, Indonesia, India, Brasil, Australia, Argentina, Arab Saudi, Amerika Serikat, Afrika Selatan. Adapun fungsi negara G20 adalah ingin mewujudkan tatanan pertumbuhan global yang hebat, berjenjang, keseimbangan, dan inklusif.

Yang paling utama adanya negara G20 ini untuk membuat suatu kebijakan-kebijakan yang berfokus kepada keseimbangan keuangan yang ada di dunia, agar tidak terjadi krisis ekonomi yang berbahaya, tentu hal itu tidak dapat terpikirkan akan bahayanya, namun di sisi lain bisa berdampak negatif maupun berdampak positif. Dampak positif salah satunya perkembangan ekonomi di Indonesia. Beberapa tahun terakhir memang dibuktikan adanya penurunan ekonomi secara global karena pandemi Covid-19, untuk itu di tahun 2022 perekonomian di Indonesia harus bersiap untuk bangkit dari keterpurukan. Menurut Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan Febrio Nathan Kancaribu mengungkapkan pada April 2022 tingkat inflasi mencapai 3,5% dan dihadapkan dengan pengaruh G20.

Tidak hanya itu, menurut Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, kegiatan G20 akan menghasilkan kontribusi sebesar US\$ 533 juta atau sekitar Rp7,4 triliun pada Pendapatan Domestik Bruto di Indonesia. Rangkaian kegiatan G20 di Indonesia akan melibatkan Usaha Micro Kecil Menengah (UMKM) dan menyerap tenaga kerja sekitar 33.000 orang. Menurut Menteri Koperasi dan UMK, Teten Masduki, Presidensi G20 juga akan mendorong investasi pada UMKM dalam negeri, mengingat saat ini 80% investor global berasal dari negara-negara G20. Fakta menunjukkan keberhasilan reformasi struktural, antara lain dengan Undang-undang Cipta Kerja, untuk meningkatkan kepercayaan investor global.

Selain itu, negara Indonesia akan berperan dalam merencanakan kebijakan pemulihan ekonomi dunia. Apabila perekonomian dunia membaik, maka kita akan menerima dampak positifnya, salah satunya ekspor yang akan tumbuh tinggi, peningkatan konsumsi domestik hingga Rp1,7 triliun. Adapun dari sisi pariwisata, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Sandiaga Uno menyebut gelaran G20 akan berkontribusi terhadap proyeksi peningkatan wisatawan mancanegara hingga 1,8 juta – 3,6 juta dan juga 600 ribu – 700 ribu lapangan kerja baru ditopang kinerja bagus sektor kuliner, fashion, dan kriya. Pemulihan ekonomi dunia dan domestik juga akan meningkatkan konsumsi masyarakat, peningkatan investasi dan kegiatan ekspor-impor yang tumbuh pesat. Dampaknya, penerimaan pajak tumbuh lebih dari 18% persen, penerimaan bea cukai tumbuh lebih dari 24%, dan penerimaan PNPB tumbuh lebih dari 23%. Banyak sekali dampak positif yang terjadi, namun perlu juga ada keseimbangan di sektor dampak negatif adanya G20 tersebut.

Kemudian, dampak negatifnya adalah peningkatan sampah dari hasil perekonomian yang semakin meningkat. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) mencatat, Indonesia menghasilkan sampah sebanyak 21,88 juta ton pada 2021. Jumlah itu menurun 33,33% dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang sebanyak 32,82 juta ton. Kondisi tersebut berbeda dengan tahun 2020 yang jumlah sampahnya justru meningkat 12,63%. Sementara, jumlah timbulan sampah pada 2019 sebanyak 29,14 juta ton. Namun adanya pengaruh G20 ini diperkirakan meningkatkan potensi sampah Indonesia sebesar 68,6 juta ton. Tentu prediksi tersebut tidak boleh terjadi, ditambah lagi dengan pertumbuhan penduduk yang semakin meningkat, sehingga perlu adanya pengontrolan dan solusi tentang cara menanggulangi permasalahan sampah sebagai bagian dari dampak G20. Hal itu diciptakan untuk mendukung laju pertumbuhan ekonomi terbarukan dan kondisi *net*

*zero emission* agar dapat seimbang. Pertimbangan tersebut yang melatarbelakangi pemilihan Kabupaten Sidoarjo sebagai wilayah studi penelitian ini.

Menghadapi era industri kegiatan pengelolaan sampah di daerah Sidoarjo terus meningkat baik kuantitas, kualitas, maupun yang lainnya. Diketahui bahwa perkembangan waktu yang selalu diikuti dengan penambahan penduduk, maka otomatis jumlah timbulan sampah semakin meningkat, sementara lahan yang ada tidak bertambah, bahkan seringkali kesulitan mencari lahan yang mencukupi, untuk pemrosesan sampah. Hal ini menyebabkan arti pentingnya pengelolaan sampah, dengan melihat perkembangan waktu dan penambahan penduduk, dimana secara otomatis jumlah timbulan sampah akan semakin meningkat sementara lahan yang ada masih tetap.

Pertambahan penduduk dan segala aktivitasnya di satu sisi merupakan potensi yang besar bagi peningkatan ekonomi masyarakat, tetapi di sisi lain menimbulkan konsekuensi pada kebutuhan pelayanan publik yang lebih memadai. Tercatat berdasarkan jenis kelamin hasil sensus penduduk terakhir yakni tahun 2020, jumlah penduduk laki-laki lebih besar dibandingkan jumlah penduduk perempuan, jumlah penduduk laki laki berjumlah 1.048.574 jiwa dan jumlah penduduk perempuan 1.034.227 jiwa, dengan *sex ratio* sebesar 101. Salah satu kebutuhan tersebut adalah sektor pengelolaan sampah. Kinerja sistem pengelolaan akan sangat menentukan wajah dari suatu kawasan. Apabila kinerja sistem pengelolaan sampah baik, maka wajah kawasan tersebut akan menjadi bersih, atau sebaliknya.

**Tabel 1. Jumlah Penduduk Kabupaten Sidoarjo**

Tahun 2020 Mencapai		
Laki-laki	Perempuan	Total
• 1.048.597 Jiwa	• 1.034.227 Jiwa	• 2.082.801 Jiwa

*Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Sidoarjo (M Asrul Maulana/Umsida), 2020*

Nilai penting dari implementasi sistem kerja pengelolaan sampah, bukan hanya dilihat dari nilai estetika lingkungan, tetapi juga meliputi manfaatnya terhadap perlindungan kesehatan masyarakat, perlindungan terhadap pencemaran lingkungan, pertumbuhan ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat, serta peningkatan nilai sosial budaya masyarakat. Sampah bukan hanya menjadi masalah nasional akan tetapi juga telah menjadi masalah di dalam lingkungan perkotaan. Pengelolaan sampah yang tidak berjalan dan tidak mempertimbangkan aspek masyarakat dan lingkungan seringkali memunculkan permasalahan sosial, budaya, dan ekonomi masyarakat. Sistem yang kurang tepat, metode dan teknik pengelolaan sampah yang belum berwawasan lingkungan, seringkali berdampak negatif terhadap kesehatan masyarakat dan lingkungan.

Oleh karena itu, jumlah dan volume sampah yang besar, serta jenisnya yang beranekaragam, jika tidak dikelola dengan benar, sampah perkotaan akan menimbulkan dampak negatif berupa permasalahan lingkungan yang kompleks, seperti pencemaran air, tanah dan udara, berkembang biaknya penyakit, terganggunya ketertiban, kebersihan dan keindahan lingkungan di daerah Kabupaten Sidoarjo. Tercatat sebanyak 116 Tempat Pembuangan Sampah Terpadu yang ada di Sidoarjo (TPST), dengan 3 jenis seperti TPST Kawasan, TPST 3R (Reduce, Reuse, Recycle), dan TPST Pusat.

**Tabel 2. Jumlah TPST Kabupaten Sidoarjo**

Tempat Pembuangan Sampah Terpadu		
Nomor	Jenis TPST	Jumlah
• 1	• TPST Kawasan	• 5
• 2	• TPST 3R	• 13
• 3	• TPST Pusat	• 98
	Total	• 116

*Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Sidoarjo (M Asrul Maulana/Umsida), 2020*

Untuk membentuk Good Government Pemerintahan Kabupaten Sidoarjo, maka timbal balik dan potensi yang diperoleh masyarakat adalah timbal balik yang sesuai, masyarakat mendapatkan pelayanan sampah dan pemerintah daerah berhasil memfasilitasi masyarakat yang ada. Untuk itu penulis sepakat ingin mengkaji lebih dalam mengenai kesiapan dan solusi penumpas persampahan di Kabupaten Sidoarjo untuk menghadapi laju pertumbuhan ekonomi yang terus meningkat, sehingga perlu adanya kesiapan dalam pengaruh G20 terhadap pertumbuhan penduduk masyarakat Sidoarjo, efek bola salju G20 terhadap persampahan di Sidoarjo, mengetahui hambatan dan penyelesaian masalah peningkatan sampah sebagai akibat adanya G20 dan menciptakan lingkungan layak huni di Sidoarjo, untuk kesehatan masyarakat, sehingga penulis sepakat untuk mengagkat judul potensi negara G20 sebagai solusi penumpas persampahan kabupaten Sidoarjo untuk mendukung laju ekonomi.

### Metode Penelitian

Penelitian tersebut menggunakan metode deskriptif yaitu dengan menjelaskan, menganalisis serta memahami tentang solusi penumpas persampahan yang ada di Kabupaten Sidoarjo, serta menggunakan metode penelitian hukum normatif untuk melihat peraturan daerah kabupaten Sidoarjo dengan pendekatan kasus (*case approach*), sebagai akibat pembahasan mengenai solusi yang diberikan. Dan juga penelitian ini menggunakan data kualitatif, yakni mengambil dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Sidoarjo, Badan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Sidoarjo, dan Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Kabupaten Sidoarjo, sehingga menimbulkan data konkrit dan aktual, kemudian dijadikan sebagai bahan analisis untuk menemukan temuan baru yaitu potensi G20 terhadap ekonomi masyarakat Kabupaten Sidoarjo.

### Hasil dan Pembahasan

#### Pengaruh G20 Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat Sidoarjo

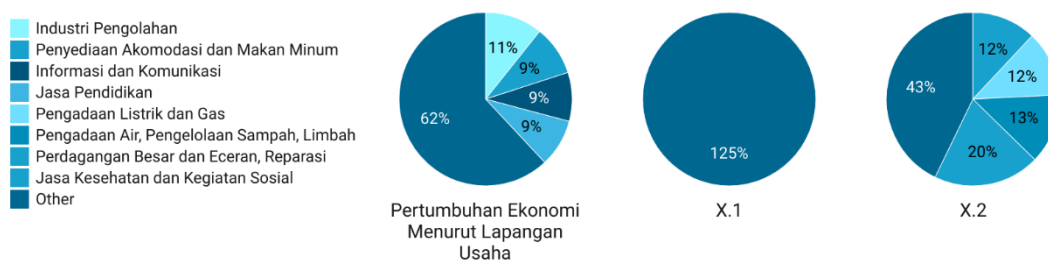
Sejauh ini pengaruh G20 terhadap pertumbuhan perekonomian di Kabupaten Sidoarjo adalah dipengaruhi oleh peningkatan sumber pertumbuhan perekonomian salah satunya sektor industri, pertumbuhan Produk Domestik Bruto, dan yang lainnya, berdasarkan fakta di Sidoarjo, efek adanya negara Indonesia sebagai anggota G20 berpengaruh besar terhadap Kabupaten Sidoarjo, menurut Badan Pusat Statistik Kabupaten Sidoarjo dari mulai tahun 2020 hingga 2021 mengalami penurunan karena terjadinya wabah Covid-19, namun sekarang ini di tahun 2022 diperkirakan mengalami kenaikan yang cukup drastis (Indah, 2022).

Terdapat beberapa jenis pengaruh G20 terhadap perekonomian Kabupaten Sidoarjo adalah Industri Pengolahan, Penyediaan akomodasi dan makan minum, informasi dan komunikasi, jasa Pendidikan, pengadaan listrik dan gas, pengadaan air, pengelolaan sampah atau limbah, perdagangan, jasa kesehatan dan kegiatan social. Meningkat dari tahun 2021 sampai sekarang. Adapun datanya sebagai berikut :

1. Tahun 2021 Industri pengolahan dan pengadaan listrik dan gas sebesar 11% meningkat menjadi 12% di tahun 2022 mendatang.
2. Tahun 2021 Penyedia Akomodasi dan pengadaan air dan pengelolaan sampah sebesar 9% meningkat menjadi 13% di tahun 2022 mendatang.
3. Tahun 2021 informasi dan komunikasi sebesar 9% meningkat hingga 13%
4. Dan yang lainnya jika dibulatkan maka persentase penurunan permasalahan yang awalnya sangat tinggi hingga mencapai 62% turun menjadi 43 %.

Berdasarkan fakta tersebut membuktikan bahwa G20 sangat berpengaruh besar terhadap mutu perkembangan ekonomi di Sidoarjo, dengan adanya penduduk yang berjumlah 2.082.801 jiwa, membuat adanya sinar terang, kebutuhan akses teratur, perpindahan penduduk yang memadai, akses kesehatan, transportasi yang kembali teratur, dibukanya lahan industri sebanyak mungkin. Tidak hanya itu, yang terpenting adalah keadaan Pendidikan yang kembali normal seperti semula, dari mulai Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Akhir, dan Perguruan Tinggi. Namun jika dilihat dengan pencerminan akan peningkatan ekonomi, pasti menimbulkan pengeluaran, pemasukan di Sidoarjo sangat pesat apalagi di topang kota Surabaya sebagai metropolitan, tentunya pengeluaran yang dihasilkan tidak sedikit. Ditambah efek G20, yang membuat investor asing dapat masuk kedalam Kabupaten Sidoarjo (Asri dkk., 2020).

**[ Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Sidoarjo ]**



Created with Datawrapper

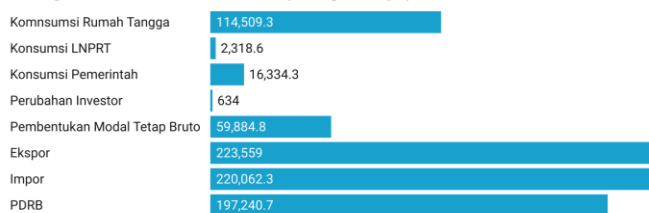
Sumber: Datawrapper Badan Pusat Statistik Kab Sidoarjo (M Asrul/Umsida), 2022

**Gambar 1. Pertumbuhan Ekonomi Macro Kabupaten Sidoarjo 2 Tahun terakhir**

Fakta peningkatan laju ekonomi masyarakat Kabupaten Sidoarjo sudah berkembang pesat, tentu akan menimbulkan pengeluaran yang sangat besar, apalagi di Tahun 2022 belum terdapat jumlah persentase perkiraan yang ada, namun jika kita melihat 2020 sebagai acuan dari pada Produk Domestik Regional Bruto kab Sidoarjo yang paling banyak adalah Konsumsi Rumah Tangga dan Ekspor Impor, karena kondisi Pandemi sehingga melakukan aktivitas di dalam rumah, namun berbeda dengan tahun 2022, sekarang ini diperbolehkan aktivitas dan berkerumun, pasti berbeda (Abidin dkk., 2018).

Tercatat, jumlah nilai tambah bruto yang timbul dari seluruh sektor perekonomian di Kabupaten Sidoarjo dibuktikan dengan pengeluaran Tahun 2020. Yaitu Konsumsi Rumah Tangga, kebutuhan Ekspor dan Impor sangat tinggi, dan di tahun 2022 bertambah sekitar 28% dari awal pandemi Covid-19 hingga saat ini, dengan nilai tertinggi adalah Konsumsi Rumah Tangga, hal itu menandakan sektor Industri di Kabupaten Sidoarjo meningkat dengan pesat, sebagai akibat G20. Hal itu dapat dilihat pada Gambar 2.

**[ Produk Domestik Regional Bruto Kab Sidoarjo Menurut Pengeluaran Tahun 2020 (Miliar Rp.) ]**



Created with Datawrapper



Sumber: Datawrapper Badan Pusat Statistik Kab Sidoarjo (M Asrul/Umsida), 2020

## Gambar 2. Produk Domestik Bruto Kabupaten Sidoarjo

### Sektor Industri

Selain pertumbuhan ekonomi yang berkembang pesat dan Produk Domesti Bruto yang semakin meningkat sebagai efek G20, terdapat temuan baru mengenai sektor industri baru di Sidoarjo yakni jumlah perusahaan industri kategori besar dan industri sedang bahkan Usaha Micro Kecil Menengah (UMKM). Berdasarkan Badan Pusat Statistik Kabupaten Sidoarjo industri di Sidoarjo meningkat 15% dari tahun 2021 hingga 2022, dan diperkirakan akan meningkat 2% di akhir tahun 2022. Namun diperkuat juga oleh Badan Perizinan Kabupaten Sidoarjo, yakni perizinan mendirikan usaha, dan perizinan mendirikan tempat usaha, dan izin mendirikan Bangunan semakin meningkat 3 tahun terakhir (Chor & Darit, 2015).

Tercatat dibagi beberapa kategori industri di Sidoarjo yakni Industri Besar seperti Perseroan terbatas, CV, Firma, Usaha Dagang, hingga koperasi, dan kategori industri sedang seperti UMKM, pedagang, agen, toko kelontong, industri produk makanan, tekstil, penjahit, online shop. Berdasarkan Badan Pusat Statistik Kabupaten Sidoarjo di tahun 2020 industri besar baru mencapai 607 perusahaan, di tahun 2021 meningkat mencapai 634, dan di tahun 2022 meningkat 664 perusahaan, dan bahkan bisa berubah. Industri sedang baru di kabupaten Sidoarjo tahun 2020 mencapai 241 usaha, di tahun 2021 meningkat mencapai 250 usaha, dan di tahun 2022 diperkirakan meningkat mencapai 297 usaha. Sehingga efek peningkatan ekonomi sebagai akibat G20 menimbulkan banyak sekali manfaat, tercatat menurut Badan Pusat Statistik angka pengangguran di Sidoarjo menurun, karena lahan lapangan pekerjaan semakin bertambah, namun memang mengalami masalah terkait awal pandemi hingga 2021 yang mana sempat mengalami kenaikan angka pengangguran, dan saat ini terdapat lulusan baru yang mana akan menambah Sumber Daya Manusia (SDM) untuk bekerja dan peran mahasiswa sangat diperlukan untuk menumpas pengangguran di Sidoarjo. Hal itu dapat dilihat pada Tabel 3.

**Tabel 3. Jumlah Industri Kabupaten Sidoarjo**

3 Tahun Terakhir	Tempat Pembuangan Sampah Terpadu	
	Industri Besar	Industri Kecil
• 2020	• 607	• 241
• 2021	• 634	• 250
• 2022	• 664	• 297

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Sidoarjo (M Asrul Maulana/Umsida), 2022

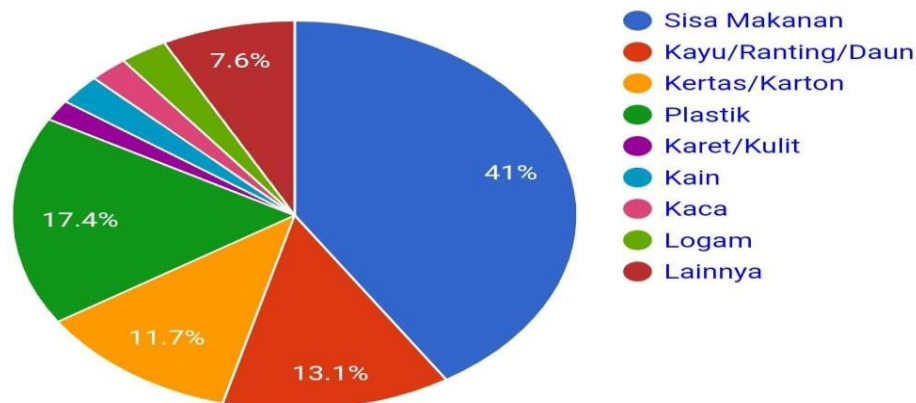
### Efek Bola Salju G20 Terhadap Persampahan di Sidoarjo

Adanya peningkatan ekonomi dan pertambahan industri baru di Sidoarjo tentunya sangat bagus bagi Kabupaten Sidoarjo sebagai efek dari G20 itu sendiri, ditambah lagi aktivitas pasca pandemi bisa dilakukan kembali, hal ini menjadi peluang untuk mengupgrade SDM di Sidoarjo. Akan tetapi hal itu menimbulkan dampak negatif yang dihasilkan yakni kenaikan persampahan sebagai akibat dari perindustrian dan aktivitas masyarakat, industri tersebut mengakibatkan efek bola salju dan permasalahan baru mengenai kesehatan dan kebersihan lingkungan (Ahmad & Hasan, 2016).

Menurut Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Kabupaten Sidoarjo tercatat hasil timbulan sampah sebagai akibat aktivitas masyarakat terbanyak dipengaruhi

oleh sisa makanan yakni sebesar 41%, kemudian sampah plastik sebesar 17,4%, sampah berjenis kayu/ranting/daun sebesar 13,1%. Sampah berjenis kertas/karton berjumlah 11,7%, dan yang lainnya, hal itu sudah jelas menandakan bahwa kenaikan industri baru mengakibatkan timbulan sampah yang meningkat, hal itu dapat dilihat pada gambar 3.

### Komposisi Sampah Berdasarkan Jenis Sampah



Sumber: Datawrapper Badan Pusat Statistik Kab Sidoarjo (M Asrul/Umsida), 2022

### Gambar 3. Jenis Sampah

Pertumbuhan volume sampah sebagai pembuktian adanya pertumbuhan volume persampahan dalam keadaan naik atau turun dapat dilihat dalam persentase timbulan sampah di Kabupaten Sidoarjo, dari mulai Tempat Pembuangan Sampah (TPS), Tempat Pembuangan Sampah Terpadu (TPST), hingga Tempat Pembuangan 3R yakni *Reduce, Reuse, Recycle*, maka di seluruh kecamatan Sidoarjo pada tahun 2019 hingga 2021 mengalami kenaikan yang sangat pesat yakni tahun 2019 308 ton/hari, tahun 2020 307 ton/hari, dan tahun 2021 370 ton/hari.

### Peran Pemerintah Terhadap Retribusi Pelayanan Persampahan

Adapun peran pemerintah sendiri dalam menangani persampahan yang ada di Sidoarjo melalui retribusi daerah dan pajak memiliki perbedaan masing-masing, meskipun retribusi daerah dengan pajak adalah sumber pendapatan bagi daerah untuk membiayai pembangunan wilayah. Retribusi Daerah memiliki beberapa obyek tertentu yakni jasa umum, jasa usaha, dan perizinan tertentu, Beberapa jenis obyek retribusi. Jenis retribusi jasa umum yaitu pungutanoleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan umum dan kepentingan yang dapat dinikmati oleh orang Pribadi atau Badan, seperti retribusi kebersihan, retribusi kartu tanda penduduk (KTP), retribusi pengujian kendaraan bermotor, dan lain sebagainya (Mukhlis dkk., 2020).

Secara yuridis sudah diatur kedalam Perda Kabupaten Sidoarjo Nomor 6 Tahun 2012 tentang Retribusi pelayanan persampahan/kebersihan yang selanjutnya disebut retribusi sampah ialah biaya yang dipungut pemerintah daerah sebagai imbalan atas pelayanan kebersihan dan pengelolaan sampah. Mulai dari penghimpunan data obyek dan subyek retribusi, penentuan besarnya retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan retribusi kepada wajib retribusi, serta pengawasan penyeterannya. Sedangkan untuk jasa umum yaitu jasa yang disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan. Namun sejauh ini belum maksimal dalam penumpasan persampahan (Habibullah dkk., 2021).

## Solusi Penumpas Persampahan di Sidoarjo

Adanya pengaruh G20 terhadap perkembangan perekonomian ditambah pengaruh efek bola salju terhadap persampahan di Sidoarjo menimbulkan hambatan-hambatan yang perlu di lakukan pencegahan, hambatannya adalah sebagai berikut :

Ketidakmerataan tempat pembuangan sampah di Kabupaten Sidoarjo, sebagaimana diketahui bersamaan, bahwasanya untuk wilayah Kecamatan Sidoarjo, Kecamatan Candi dan Kecamatan Buduran, identik dengan wilayah tengah kota yang menjadi diagframa laju aktivitas persampahan. Dan di Kecamatan pelosok wilayah tertinggal, padahal disitu Kawasan Industri, seperti Kecamatan Wonoayu, Krembung, dan Sukodono. Akibat belum meratanya persampahan itulah pemerintah harus menyediakan pos-pos penerimaan retribusi pelayanan persampahan.

Adapun solusinya adalah menambah titik Tempat Pembuangan Sampah (TPS) di kecamatan Jabon, Kecamatan Krembung, Kecamatan Porong, Kecamatan Krian, Kecamatan Balongbendo, dan Kecamatan Taman, agar akses pelayanan persampahan lebih optimal. Jika itu dilakukan maka akan berdampak besar bagi masyarakat, adanya pemerataan pembangunan, keindahan desa tradisional, mudahnya masyarakat dalam membuang sampah, dan yang terpenting masyarakat Sidoarjo sehat, dapat dilihat pada Gambar 4.



Sumber: Google Maps, 2022

**Gambar 4. Titik-Titik Tempat Pembuangan Sampah Kabupaten Sidoarjo**

Selain itu, adanya kekosongan hukum yang perlu ditingkatkan yang ada di Desa, yaitu keadaan dimana Peraturan Desa (Perdes) yang ada di Sidoarjo masih terbilang rendah, adanya kesenjangan kekosongan peraturan tersebut membuat pelayanan persampahan di Sidoarjo tidak optimal, tercatat di beberapa kecamatan di Sidoarjo belum menerapkan Perdes, sehingga menimbulkan problematika dalam menerapkan Perda Kabupaten Sidoarjo Nomor 6 Tahun 2012 (Ambarwati, 2022).

Upaya mengoptimalkan peraturan Desa tentang pengelolaan sampah, pelayanan sampah, dan retribusi pelayanan persampahan, agar Perda Kabupaten Sidoarjo No 6 Tahun 2012 dapat berjalan lancar, dan secara yuridis peraturan dapat terstruktur tanpa adanya kesenjangan kualitas, selain itu, perlu adanya bimbingan dan kerjasama dari pihak akademisi dalam memfasilitasi pembentukan Perdes, salah satunya peran Universitas dan tenaga akademisi seperti dosen yang menjadi garda depan pengoptimalan kekosongan hukum, Seperti yang dilakukan oleh Universitas Muhammadiyah Sidoarjo (Umsida) dan Lembaga Konsultasi Bantuan Hukum (LKBH), yang mana sejauh ini program kerja Lembaga tersebut, menerapkan Desa sadar hukum dan pembuatan naskah akademik dan penyusunan rancangan Perdes, hal itu dilakukan oleh para mahasiswa program studi Hukum Umsida. Sehingga masyarakat terbantu dengan sinergitas tersebut, bahkan tidak hanya retribusi persampahan, Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) juga menjadi daya



Tarik untuk dilakukan pengoptimalan, agar nantinya dapat menambah nilai bisnis, dan kondisi volume di setiap desa berkurang (Fatoni, 2018).

Tidak menggandeng pihak swasta dalam pengelolaan sampah, fakta masyarakat memang sudah tidak asing lagi, pemerintah Kabupaten Sidoarjo sangat jarang bekerjasama atau menjalin mitra dengan pihak pengelolaan sampah, padahal dari situ pemerintah bisa ringan menjalankan tugasnya. Retribusi sampah pada pihak swasta atau perusahaan non izin, tidak begitu di pedulikan, budaya yang penting membayar sudah menjadi kebiasaan buruk, padahal dari situ dapat berdampak buruk bagi lingkungan, karena suatu perusahaan yang tabu sangat sulit diketahui jenis pengelolaan sampah, sehingga pelayanan persampahan perlu ditingkatkan pada DLHK Sidoarjo, seperti memperbanyak sosialisasi kepada masyarakat akan pentingnya menjaga lingkungan, dan aktif membayar retribusi. Selain itu, perlu juga menggandeng komunitas-komunitas pencinta alam dan lingkungan, seperti Pepelingsih (Pemuda Peduli Lingkungan Sehat dan Bersih), Unit Kegiatan Mahasiswa Pecinta Alam (HIMPAS) Umsida, dan peran komunitas lainnya, tidak hanya itu, adanya program kerja kebersihan masal juga perlu diadakan setahun sekali, demi mendapatkan penghargaan Adipura, tercatat 2017 Kabupaten Sidoarjo mendapat penghargaan Adipura, oleh karena itu hingga saat ini, perlu adanya sinergitas, demi mewujudkan puncak kebersihan dan kesehatan masyarakat.

Kurangnya sosialisasi terkait pembayaran retribusi pelayanan persampahan via online dari pemerintah yang belum maksimal, karena berdasarkan Perda Kabupaten Sidoarjo No. 6 Tahun 2012 diatur kegiatan piutang, sanksi administrasi, dan struktur besarnya tarif, sehingga atas Perda tersebut, pemerintah harus membuat pengoptimalan pelayanan berbasis digital untuk memenuhi kebutuhan rakyat Sidoarjo. Sejauh ini Sidoarjo sudah memiliki SIPPAS Retribusi yang dikembangkan oleh DLHK, namun pada kenyataannya, aplikasi tersebut tidak berjalan dengan baik, banyak masyarakat yang tidak menggunakan aplikasi tersebut, sehingga nilai manfaat teknologi menjadi berkurang (antari & Jannah, 2016).

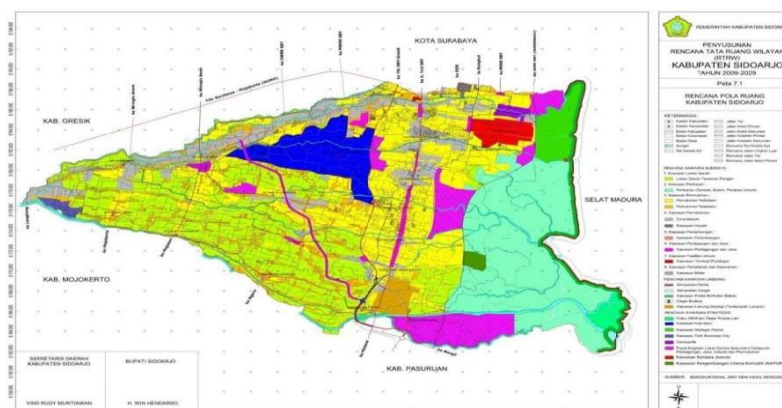
Adapun solusinya adalah pertama melakukan pengiklanan terkait system pelayanan retribusi, melakukan aksi turun kebawah oleh pihak DLHK untuk mensosialisasi masyarakat, pelajar, atau mahasiswa, yang kedua menaikan rating unduhan di Playstore, atau platform yang lain, demi terciptanya kemanfaatan teknologi, yang terakhir apabila seluruh masyarakat dari segi pola tata ruang terpenuhi, akses persampahan terjangkau, segi peraturan dapat optimal dan terstruktur, dan menggandeng akses kerjasama retribusi tentang pelayanan persampahan oleh pihak swasta, maka aplikasi tersebut secara otomatis dapat bermanfaat.

### **Konsep SDGs Untuk Menciptakan Kabupaten Sidoarjo**

Tujuan pembangunan berkelanjutan retribusi persampahan adalah, pertama jika pemenuhan titik tempat pembuangan sampah (TPS) yang ada di desa dan tempat umum memadahi, hingga pusat Tempat Pembuangan Sampah Akhir (TPA) dapat berjalan berjalan dengan baik, maka akan menimbulkan mobilitas masyarakat dapat terpenuhi, aktivitasnya, ekonominya, dan kebutuhan yang lain. Jika demikian, perlu juga membentuk lingkungan hukum yang aktif, Perda sudah ada, dan Perdes setiap desa sudah ada dan berjalan, maka akan menimbulkan kesejahteraan masyarakat Desa, dari kedua aktivitas tersebut eksternalnya kita perlu menggandeng komunitas-komunitas pencinta alam, demi memberikan wawasan keilmuan dan kesadaran masyarakat akan pentingnya membuang sampah pada tempatnya, dan yang terakhir, sistem pembayaran retribusi pelayanan persampahan di Sidoarjo dapat dioptimalkan, karena sistem yang teratur. Sehingga masyarakat sidarjo bisa menghuni dengan layak, tanpa ada polusi sampah, lingkungan yang buruk dan menimbulkan pemerintahan yang teratur.

### **Rencana Pembangunan Kabupaten Sidoarjo**

Selain itu, untuk menciptakan kondisi yang layak huni atau net zero emission adalah melancarkan pembangunan yang digagas oleh Badan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Sidoarjo Dibuktikan dengan Perda Kabupaten Sidoarjo Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021-2026, yakni tentang Distrik hijau, area industri city, dan kota baru, dapat dilihat pada table berikut dengan warna biru adalah rencana pembangunan kota baru, karena disitu wilayah kecamatan Sukodono, Taman, dan Waru terdapat pasar terbesar se-jawa timur yakni Pasar Agro Sidoarjo, dan nantinya akan menjadi pusat keramaian kedua setelah kecamatan Sidoarjo, dilihat pada Gambar 5.



Sumber: Perda Kabupaten Sidoarjo Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021-2026 (M Asrul/Umsida), 2021

### Gambar 5. Perencanaan Pembangunan Wilayah Kabupaten Sidoarjo

Wilayah dengan warna hijau pupus adalah wilayah perindustrian yakni kecamatan Krembung, kecamatan, Krian, Balongbendo, Tarik, serta warna Hijau Matang yakni wilayah kecamatan Sedati adalah difokuskan pertambakan dan perikanan, diikuti pula dengan kecamatan Buduran, Jabon dan Porong, dan berwarna ungu dikategorikan sebagai wilayah focus bencana dan sumber air bersih, tepatnya diwilayah kecamatan prong yakni lumpur lapindo dan PDAM Sidoarjo, menariknya lagi, untuk Kecamatan Wonoayu, dan Tulangan difokuska wilayah Pertanian. Hal itu apabila terjadi maka akan menimbulkan tempat layak huni dan menjadi peradaban kabupaten terbesar setelah Kota Surabaya.

### Kesimpulan

Sebagai akibat adanya G20 membuat perekonomian di Kabupaten Sidoarjo meningkat dapat dibuktikan industri baru, tercatat dibagi beberapa kategori industri di Sidoarjo yakni Industri Besar seperti Perseroan terbatas, CV, Firma, Usaha Dagang, hingga koperasi, dan kategori industry sedang seperti UMKM, pedagang, agen, toko kelontong, industri produk makanan, tekstil, penjahit, online shop. Hal itu dapat menimbulkan kenaikan persampahan yakni sebesar 370 ton/hari di tahun 2021, namun terdapat potensi yang sangat besar yakni permasalahan persampahan yang timbul sehingga persampahan harus ditumpas dengan cara menambah titik TPS, TPST dan TPA, keteraturan hukum antara Peraturan Daerah dengan Peraturan Desa, menambah kerjasama dalam pengelolaan Sampah, dan mengoptimalkan aplikasi retribusi Sippas oleh DLHK.

Selain itu konsep SDGs untuk membentuk wilayah kabupaten yang layak huni melalui pembangunan perencanaan Kabupaten Sidoarjo yang bersih melalui Perda Kabupaten Sidoarjo Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021-2026, dan dari situ solusi penumpas persampahan yang ada di Sidoarjo sebagai akibat peningkatan perekonomian negara G20 dapat terwujud.

### Daftar Pustaka

- Abidin, N. Z., Yussof, I., Ismail, R., & Karim, Z. A. (2018). Pengaruh modal manusia terhadap pertumbuhan produktiviti faktor keseluruhan di Negara ASEAN+3 terpilih. *Jurnal Ekonomi Malaysia*, 52(3), 57–74. <https://doi.org/10.17576/jem-2018-5203-5>
- Ahmad, R., & Hasan, J. (2016). Early warning systems for banking crises: Political and economic stability. *Jurnal Ekonomi Malaysia*, 50(1), 29–40. <https://doi.org/10.17576/jem-2016-5001-03>
- Ambarwati, D. (2022). Urgensi pembaharuan hukum di Era Metaverse dalam perspektif hukum progresif. *DIALEKTIKA: Jurnal Ekonomi dan Ilmu Sosial*, 7(2), 151–167. <https://doi.org/10.36636/dialektika.v7i2.1306>
- Antari, ni putu bayu widhi, & Jannah, L. M. (2016). The role of Denpasar Government in supporting the resources of endek fabric creative industry. *Bisnis & Birokrasi Journal*, 22(1), 16–35. <https://doi.org/10.20476/jbb.v22i1.5426>
- Asri, A. K. M., Abdul-Rahman, A., & Janor, H. (2020). Perubahan makroekonomi, persaingan harga barang pengganti dan eksport sawit Malaysia. *Jurnal Ekonomi Malaysia*, 54(1), 193–211. <https://doi.org/10.17576/jem-2020-5401-14>
- Chor, F. T., & Darit, S. M. (2015). Penentu makroekonomi kadar jenayah di Malaysia. *Jurnal Ekonomi Malaysia*, 49(2), 53–60. <https://doi.org/10.17576/jem-2015-4902-05>
- Fatoni, M. (2018). Analisis kebijakan politik hukum pemerintah Kota Cilegon atas peningkatan pembangunan ekonomi Tahun 2010-2015. *CosmoGov*, 4(1), 16–37. <https://doi.org/10.24198/cosmogov.v4i1.14333>
- Indah, R. N. (2022, Februari 20). *Apa itu G20 dan manfaatnya untuk Indonesia*. <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-singawang/baca-artikel/14747/Apa-itu-G20-dan-Manfaatnya-untuk-Indonesia.html>
- Mukhlis, Hidayah, I., & Retnasih, N. R. (2020). Interest rate volatility of the federal funds rate: Response of the Bank Indonesia and its impact on the Indonesian economic stability. *Journal of Central Banking Theory and Practice*, 9(1), 111–133. <https://doi.org/10.2478/jcbtp-2020-0007>